1st ACE
ANDALAS CIVIL ENGINEERING NATIONAL CONFERENCE 2014

PADANG, 27 NOVEMBER 2014

JURUSAN TEKNIK SIPIL
UNIVERSITAS ANDALAS

Sertifikat

No: 35/A/ACE2014

Diberikan kepada

BAMBANG ISTIJONO

sebagai

PEMAKALAH

Ketua Jurusan Teknik Sipil
Fakultas Teknik, Universitas Andalas

PURNAWAN, PhD
NIP.196008281991030 03

Ketua Panitia
ACE National Conference 2014

1st ACE
ANDALAS CIVIL ENGINEERING NATIONAL CONFERENCE 2014

YOSRITZAL, PhD
NIP.197402272000031001

Prosiding

1st Andalas Civil Engineering National Conference 2014

Peningkatan Kualitas Infrastruktur untuk Pencegahan Bencana

Editor:

Taufika Ophiyandri	(Ketua)
Yosritzal	(Anggota)
Benny Hidayat	(Anggota)
Masrilayanti	(Anggota)
Sabril Haris	(Anggota)

Pelaksana:

Jurusan Teknik Sipil
Fakultas Teknik Universitas Andalas
Padang

Penerbit:

Fakultas Teknik Universitas Andalas

Hak Cipta @2015 pada Fakultas Teknik
Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, mereka, atau teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penulis.

Diterbitkan oleh:
Fakultas Teknik Universitas Andalas
Kampus Unand Limau Manis
Padang, Indonesia 25163

ISBN: 978-602-9081-13-8

DAFTAR ISI

Perencanaan Perkerasan Kaku dengan Penambahan Gambangan 1
Muhammad Idham, Marhadi Sastra

Menentukan Koefisien Manning Karpet Talang dan Melihat Pengaruh Geometri Penampang Melintang Saluran Terhadap Koefisien Manning Karpet Talang 8
Mas Mera, Rahmi Hardianti

Kajian Penilaian Penumpang Terhadap Kinerja Pelayanan Trans Padang (Studi Kasus Trans Padang Koridor I) 14
Afrilda Sari, Purnawan, Titi Kurniati

Model Kerjasama Antar Instansi untuk Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah 34
Ipak Neneng Mardiah Bukit, Lely Masthura

Pemeriksaan Mortar Mutu Tinggi Dengan Penambahan Belerang dan Sikament-LN 47
Ellyza Chairina, Subur Panjaitan, Oktana Loviatu Mul Never

Penggunaan Limbah Cangkang Kelapa Sawit (CKS) Sebagai Agregat Kasar pada Campuran Aspal HRS-WC 52
Elsa Eka Putri, Arief Adrian, M. Hariadi

Peramalan Curah Hujan dan Debit Puncak Menggunakan Jaringan Saraf Tiruan *Algoritma Backpropagation* dalam Rangka Mendukung Program Mitigasi Bencana Banjir (Studi Kasus : DAS Air Bengkulu, Kota Bengkulu-Indonesia) 65
Gusta Gunawan

Perilaku Evakuasi Masyarakat di Zona Rawan Tsunami (Studi kasus Kota Padang) 73
Yollan Randova, Purnawan

Pengembangan Model Manajemen Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat Nagari 85
Helny Lalan, Akhmad Suraji, Taufika Ophiyandri

Studi Perbandingan Anggaran Biaya Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Jalan dengan Tiga Variasi Pemilihan Variabel (Studi Kasus : Pada Satker PJN II Propinsi Sumatera Barat) 101
Purnawan, Hendra Gunawan, Siska Martha Sari

Evaluasi Kapasitas Seismik Struktur Bangunan Bertingkat Beton Bertulang Eksisting 127
Nining Mustika Liza, Maidiawati, Jafril Tanjung

Studi Parametrik Pergerakan Garis Netral Pada Penampang Balok Beton Bertulang dengan Program *RCCSA* 134
Rendy Thamrin

Studi Implementasi Metoda Importance-Satisfaction Analysis (ISA) pada Penentuan Prioritas Penanganan Pelayanan Kereta Api Padang-Pariaman 143
Yosritzal, Bayu Martanto Adji, Feri Nofrizal, Revi Andika

Evaluasi Keandalan Sarana Penyelamatan Jiwa terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung 153
Dafriansyah Putra, Benny Hidayat, Bambang Istijono

Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi dan Riwayat Kecelakaan terhadap Perilaku Pengemudi Sepeda Motor Indonesia 167
Leksmono Suryo Putranto, Rostiana

Studi Korelasi antara Lendutan Falling Weight Deflectometer dengan Benkelmen Beam 174
Andi Mulya Rusli, Angelalia Roza, Purnawan, Elsa Eka Putri

State of The Art Model Penilaian Risiko Bencana Gempa Bumi untuk Ruas Jalan di Indonesia 186
Mona Foralisa Toyfur

Pemodelan dan Prediksi Tingkat Kebisingan Akibat Lalu Lintas di SD Negeri 10 Aur Duri Kota Padang 195
Helga Yermadona

Praktek Konstruksi Developer di Kota Padang dalam Mewujudkan Rumah Sederhana (*Non-Enginered House*) Tahan Gempa 203
Yervi Hesna

Building Assesment Kelayakan Struktur Gedung Kantor Cabang BRI Jalan Khatib Sulaiman no. 50 Padang 211
Zaidir, Fauzan, Abdul Hakam, Febrin A Ismail

Hambatan Pembangunan Infrastruktur Akibat Pembebasan Lahan: Kasus Pekerjaan Pengendalian Banjir Kawasan Air Pacah Kota Padang 221
Bambang Istijono

Hambatan Pembangunan Infrastruktur Akibat Pembebasan Lahan: Kasus Pekerjaan Pengendalian Banjir Kawasan Air Pacah Kota Padang

Bambang Istijono

Staf pengajar, Jurusan Teknik Sipil Universitas Andalas; bistijono@ft.unand.ac.id
bistijono1452@yahoo.co.id

Abstrak

Pembangunan akan memberikan nilai positif terhadap masyarakat dan lingkungannya, termasuk pembangunan bidang sumber daya air, bila pembangunan tersebut dapat diselesaikan tepat waktu, tepat mutu dan tetap biaya. Salah satu syarat waktu tidak tercapai, bisa karena lahan untuk tapak bangunan yang belum dapat dibebaskan maka manfaat pembangunan akan tertunda. Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan pengadaan tanah dalam pembangunan untuk kepentingan umum belum sepenuhnya dapat menyelesaikan permasalahan pembebasan lahan pada infrastruktur yang memerlukan lahan yang luas.

Pemerintah sebagai penanggung jawab dan penyelenggara pembangunan wajib mempersiapkan lahan yang akan terkena tapak bangunan dan selanjutnya menyerahkan lahannya kepada penyedia jasa/kontraktor segera setelah kontrak kerja ditanda tangani masing-masing pihak. Kenyataan di lapangan pada beberapa pekerjaan, pembebasan lahan sebagai kendala dilapangan sehingga kontraktor tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai skope/jenis pekerjaan yang tertuang dalam kontrak pekerjaan, seperti pada pekerjaan pengendalian banjir di kawasan Air Pacah kota Padang yang direncanakan dapat mengendalikan genangan air pada kawasan perkantoran, permukiman dan prasarana umum lainnya pada akhir tahun 2014.

Artikel ini adalah hasil telaah pustaka bersumber dari literatur ilmiah, peraturan-peraturan pemerintah dan penelitian lapangan terhadap pelaksanaan pekerjaan pengendalian banjir Batang Maransi dan Batang Luruih di Kawasan Air Pacah Kota Padang, yaitu pekerjaan penggalian tanah di sungai, pembuatan tanggul dan perkuatan tebing pada bagian kiri/kanan sungai.

Secara umum hasil pekerjaan sesuai tahapannya belum dapat dilaksanakan, karena kendala pembebasan lahan sehingga manfaat proyek menjadi tertunda.

Kata kunci : pemerintah, pembangunan, pengendalian banjir, lahan

1. Pendahuluan

Banjir yang menggenangi kawasan perkantoran, permukiman dan sarana umum dapat terjadi selama atau setelah terjadi hujan. Air hujan yang masuk ke dalam sungai, apabila melebihi daya tampung sungai, maka air akan meluap dan mengalir ke tempat-tempat yang rendah. Aktivitas manusia sering menjadi penyebab banjir seperti mendirikan bangunan pada sempadan sungai, membangun perkantoran dan perumahan di daerah resapan air, melakukan penebangan hutan secara liar, membuang sampah ke sungai.

Selama ini usaha pengendalian banjir sudah banyak dilakukan oleh Pemerintah, namun kejadian banjir masih ada dan disebagian lokasi meningkat dari waktu ke waktu. Fenomena ini diketahui oleh banyak pihak, karena kejadian banjir memang sangat komplek, baik itu proses di lahan/penataan ruang pada daerah aliran sungainya maupun pada sumber air sungainya. Oleh karenanya pengendalian banjir tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), pengelolaan sumber daya air (SDA) dan penataan ruang secara keseluruhan yang merupakan kegiatan terpadu. Saat ini pengelolaan lahan/penataan ruang dan pengelolaan SDA yang menyangkut pendayagunaan, konservasi serta pengendalian daya rusak masih belum optimal yang dimungkinkan adanya perbedaan persepsi oleh masing-masing sektor.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak bencana banjir adalah penataan ruang kawasan dan melaksanakan bangunan/saluran pengendali banjir. Sebagai contoh terlihat

dampaknya terhadap pembangunan kawasan baru di Kecamatan Koto Tengah bagian utara kota Padang yang sebelumnya merupakan daerah resapan air dan pertanian sawah, setelah gempa besar di Sumatera Barat tanggal 30 September 2009 telah berubah menjadi kawasan perumahan dan perkantoran.

Tulisan ini dimaksudkan untuk membangkitkan kesungguhan dalam memahami produk aturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, rencana tata ruang kawasan untuk masyarakat dan aparatur pemerintah. Rencana kawasan yang baik tentunya apabila dapat menggambarkan kemungkinan yang akan terjadi pada kurun waktu tertentu, dipedomani dalam pembangunan daerah dan memperhatikan kondisi lingkungan, utamanya pengendalian daya rusak air yang memerlukan lahan untuk pembangunannya. Sehingga siapapun yang berkepentingan dalam pemanfaatan ruang akan dapat gambaran dalam melaksanakan kegiatan terkait dengan memanfaatkan ruang, termasuk dimana dan apa yang boleh serta apa yang tidak diijinkan.

2. Metodologi

Pelaksanaan penelitian ini didasari oleh peraturan perundang-undangan penyediaan lahan pembangunan untuk kepentingan umum, pemindahan kawasan pusat pemerintahan kota Padang, melakukan wawancara dengan pemangku kepentingan dan masyarakat terkait dengan permasalahan resiko bencana banjir. Untuk itu, dianalisa kasus pembangunan kawasan di sekitar Batang Luruih dan Batang Maransi di Kecamatan Koto Tangah, bagian utara Kota Padang.

3. Tinjauan Pustaka

3.1. Pendekatan Persamaan Proses Terjadinya Banjir

Secara umum aliran air permukaan (surface run-off) sama dengan jumlah volume air hujan dikurangkan keseluruhan cegatan air (interception), resapan air (infiltration), tampungan air (storage), penguapan air (evaporation) dan penguapan tanaman (transpiration).

Saat berlangsungnya hujan, maka penyinaran matahari kurang dan kelembaban udara tinggi, sehingga penguapan air dan penguapan dari tanaman kecil pengaruhnya, kalau diabaikan maka persamaan dapat disederhanakan menjadi :

$$AP = VH - (C + R + T)$$

Dimana :

AP = aliran air permukaan

VH = volume air hujan

C = cegatan air

R = resapan air

T = tampungan air

Nilai AP akan besar jika nilai C,R dan T kecil, dan sebaliknya nilai AP akan kecil bilamana nilai C,R dan T besar. Semakin besar aliran air permukaan maka semakin besar juga potensi banjir yang akan terjadi, dan jika AP melampaui kapasitas tampung sungainya maka terjadi banjir.

Saat kondisi daerah aliran sungai masih baik, tutupan lahan hutan masih baik maka nilai cegatan air dan resapan air besar. Sehingga pada waktu hujan, debit aliran permukaan kecil dan aliran air sungai kemungkinan tidak melimpas, dan pada saat musim kemarau air hujan yang awalnya dicegat oleh perakaran pohon akan meresap kedalam tanah menjadi aliran air tanah yang secara lambat mengalir ke sungai.

3.2. Pembangunan dan Banjir

Banjir yang melanda Kawasan Air Pacah Kota Padang pada Jumat 26 Agustus 2011 dan Selasa 26 Agustus 2014 yang menggenangi perkantoran dan permukiman sebagai akibat meluapnya Batang Luruih dan Batang Balimbing, seakan menyadarkan kepada kita tentang pentingnya pengelolaan sumber daya air dan penataan ruang kawasan secara komprehensif dan berwawasan lingkungan. Banjir merupakan fenomena alam berupa meluapnya air di sungai melebihi kapasitas palungnya, selanjutnya menggenangi bagian lahan yang lebih rendah yang dapat berupa permukiman, perkantoran maupun lahan pertanian.

Tingginya luapan air dapat terjadi karena tingginya curah hujan di bagian hulu DAS menyebabkan aliran sungai tidak tertampung pada palungnya, tertahannya aliran sungai dengan adanya penyempitan palung sungai akibat pemanfaatan sempadan sungai yang tidak tepat, adanya pendangkalan dasar sungainya, tertahannya aliran sungai karena laut pasang di muaranya, atau karena bagian tanah tidak mampu dengan cepat menyalurkan melalui system drainase yang ada.

a. Upaya represif bersifat fisik/ struktur.

   Yang telah dilakukan oleh Pemerintah pada dasarnya meliputi 3 kegiatan, yaitu :

   1) Merendahkan elevasi muka air di sungai, antara lain dengan perbaikan alur sungai, pembuatan kanal banjir atau sudetan.
   2) Mencegah meluapnya air sungai dengan intensitas tertentu (periode ulang 5 sampai dengan 25 tahun), antara lain dengan pembangunan tanggul sungai.
   3) Memperkecil debit banjir di sungai, antara lain dengan membuat waduk air dihulu, penggunaan lahan yang rendah untuk retensi air.

   Selain itu aktivitas manusia yang tidak langsung dan langsung merusak lingkungan seperti penebangan hutan, melakukan usaha pertanian yang tidak memperhatikan aspek konservasi tanah dan air, melakukan pembuangan sampah di palung sungai sehingga menyebabkan sedimentasi, memanfaatkan sempadan sungai untuk kegiatan yang mengganggu aliran banjir.

b. Upaya preventif bersifat non-struktur.

   Diantaranya meliputi :

   1) Melaksanakan konservasi tanah dan air di DAS bagian hulu dalam kaitan nya dengan pengendalian erosi lahan.
   2) Pengelolaan lahan DAS dengan penataan ruang untuk memperkecil limpasan air permukaan.
   3) Pengaturan penggunaan lahan di kawasan banjir.
   4) Penetapan sempadan sungai dan penggunaan lahan di kawasan sungai.
   5) Penerapan building codes pada kawasan banjir, antara lain dengan rekomendasi persyaratan konstruksi.
   6) Kesiap siagaan bila kemungkinan akan terjadi banjir.

   Dalam kenyataannya upaya preventif belum berjalan efektif sesuai harapan, utamanya dengan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mematuhi hukum, cepat melupakan kejadian banjir sebelumnya dan kebersamaan dalam pengelolaan sungai.

3.3. Pendekatan Pembebasan Lahan yang Terkena Tapak Pembangunan [9-10].

Penyediaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam peraturan perundang-undangan yang substansinya didasarkan asas hukum, sebagai berikut :

a. Asas Kemanusiaan, pengadaan tanah harus memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proposional.
b. Asas Keadilan, memberikan jaminan penggantian yang layak kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik.
c. Asas Kemanfaatan, hasil pengadaan tanah mampu memberikan manfaat secara luas bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
d. Asas Kepastian, memberikan kepastian hukum tersedianya tanah dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan dan memberikan jaminan kepada pihak yang berhak untuk mendapatkan ganti kerugian yang layak.
e. Asas Keterbukaan, pengadaan tanah untuk pembangunan dilaksanakan dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengadaan tanah.
f. Asas Kesepakatan, proses pengadaan tanah dilakukan dengan musyawarah para pihak tanpa

unsur paksaan untuk mendapatkan kesepakatan bersama.

g. Asas Keikutsertaan, dukungan dalam penyelenggaraan pengadaan tanah melalui partisipasi masyarakat, baik secara langsung, sejak perencanaan sampai dengan kegiatan pembangunan.
h. Asas Kesejahteraan, pengadaan tanah untuk pembangunan dapat memberikan nilai tambah bagi kelangsungan kehidupan pihak yang berhak dan masyarakat secara luas.
i. Asas Keberlanjutan, kegiatan pembangunan dapat berlangsung secara terus menerus, berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
j. Asas Keselarasan, pembangunan tanah untuk pembangunan dapat seimbang dan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan negara.

4. Pembahasan

4.1. Deskripsi Lokasi Studi

Kota Padang merupakan salah satu kota besar di Sumatera dengan jumlah penduduk pada tahun 2012 sejumlah 844.316 jiwa. Wilayah kota merupakan daerah yang relative datar di ketinggian +2.00 sampai dengan +15.00 dari permukaan laut.

Secara historis, penduduk kota Padang pertama kali bermukim pada abad ke-15 di bantaran muara Batang Arau. Lambat laun, bantaran sungai Batang Arau semakin padat dan pengembangan pemukiman berkembang ke wilayah Pondok, Belanti (Jalan Sudirman). Kedatangan VOC-Belanda pada tahun 1667 mulai membangunan gedung-gedung di kawasan Batang Arau, menjadikan kota Padang sebagai sentra perdagangan di wilayah pantai barat Sumatera dan mewariskan tata ruang/tata kota yang berlandaskan lingkungan dan karakterisktik alam. Pemerintah Belanda membangun Banda Bakali (kanal banjir) pada tahun 1921 untuk mengatasi banjir diwilayah kota lama dengan membagi aliran banjir Batang Arau di Lubuk Begalung. Kanal banjir dan sungai besar yang melintasi kota Padang ini yang kemudian di tingkatkan kapasitas sungainya pada tahun 1999 seperti sekarang ini.

Saat ini, salah satu kawasan yang masih sering dilanda banjir adalah kawasan Maransi dan Air Pacah di Kecamatan Koto Tengah dengan jumlah penduduk kecamatan 165.633 jiwa. Menurut catatan genangan banjir di kawasan Air Pacah sepanjang tahun 2011-2013 setidaknya terjadi pada Jumat 26 Agustus 2011, Sabtu 5 Nopember 2011, Minggu 13 Nopember 2011, Kamis 1 Maret 2012, Rabu 30 Mei 2012, Jumat 19 Oktober 2012, Senin 31 Desember 2012, Kamis 9 Mei 2013, Rabu 4 September 2013, Sabtu 17 Nopember 2013, Selasa 3 Desember 2013 dan Senin 30 Desember 2013.

Di kedua kawasan ini mengalir dua sungai, Batang Maransi dan Batang Luruih. Kedua sungai merupakan orde ketiga (anak sungai) Batang Balimbing, dan Batang Balimbing merupakan orde ke dua (anak sungai) Batang Kuranji. Batang Kuranji dan Batang Balimbing telah dilakukan peningkatan dengan pelebaran dan perkuatan tebing sungainya oleh Pemerintah pada tahun 1997 sehingga mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan perbaikan Batang Maransi dan Batang Luruih yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

4.2. Permasalahan Banjir

Pada kawasan Maransi dan Air Pacah bila hujan dengan intensitas yang tinggi dan waktu yang lama terjadi banjir dengan ketinggian mencapai 0,5-1,00 m dan lama genangan bisa sampai 24 jam di Kampung Rimbo Cumateh dan areal perkantoran di Air Pacah. Meluapnya Batang Maransi dan Batang Luruih yang menyebabkan kawasan tersebut tergenang banjir selain itu perubahan tata ruang kawasan yang semula merupakan daerah pertanian dan sekarang ini berkembang menjadi permukiman, bahkan pada pasca bencana gempa 30 September 2009 kawasan ini menjadi pusat pemerintahan kota Padang (peta 1 dan gambar 1).

Peta 1. Sebagian Kota Padang Gambar 1. Kawasan yang Tergenang

Kegiatan perencanaan pengendalian banjir yang mempengarui keputusan perencanaan pengendalian banjir Batang Maransi dan Batang Luruih, antara lain [1] Study report on Padang Area Flood Control Project, December 1983 ; [2] Completion Report for Padang Area Flood Control Project (II), Project Loan No. IP-451 ; [3] Master Plan Pusat Pemerintahan Kota Padang, Bappeda Kota Padang, 2010 ; [4] Hasil Kajian Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Evakuasi dalam rangka Mitigasi Bencana Tsunami Kota Padang oleh Ditjen Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum, 2008 ; [5] Peraturan Daerah Kota Padang tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang 2010-2030 ; [6] Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2011 tentang Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang dari wilayah Kecamatan Padang Barat ke wilayah Kecamatan Koto Tengah kota Padang.

4.3. Perencanaan Pengelolaan Banjir

Seperti diketahui bersama bahwa pekerjaan pengendalian banjir di kota Padang silaksanakan sejak 1990 sampai sekarang. Kegiatan peningkatan kapasitas sungai yang telah dilaksanakan di Batang Kuranji (sungai orde satu) sepanjang 4.340 m untuk dapat menampung debit sungai 870 m3/detik dan di Batang Balimbing (sungai orde dua) sepanjang 6.660 m untuk dapat menampung debit sungai 270 m3/detik.

Dengan memperhitungkan debit banjir Batang Luruih pada periode ulang 10 tahunan sebesar 40 m3/detik, Batang Maransi 10 m3/detik dan adanya daerah retensi banjir Laras (daerah pertanian milik masyarakat) seluas 1,50 km2 dengan harapan dapat mampu menampung volume air 1,00 juta m3 (gambar 2).

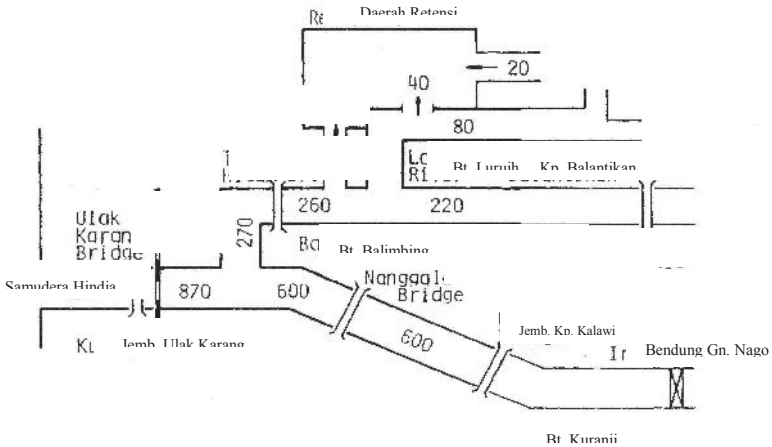

Gambar 2. Skematik Distribusi Banjir

Pasca gempa 30 September 2009, sesuai Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2011 kawasan Air Pacah direncanakan sebagai pusat pemerintahan kota Padang, oleh karena itu diharapkan kawasan Air Pacah dapat menjadi kawasan yang bebas banjir. Dengan konsekuensi Pemerintah harus

melaksanakan peningkatan kemampuan Batang Luruih dan Batang Maransi sehingga akan mampu menampung debit banjir periode ulang 25 tahunan yaitu masing-masing 120 m3/detik dan 34m/detik [7].

Dengan berubahnya kawasan Air Pacah menjadi pusat pemerintahan kota Padang maka secara teknis pengendalian banjir Batang Maransi dan Batang Luruih diharapkan dapat mengelola saat debit puncak, palung sungainya dapat sebagai tampungan air dan lingkungan sungai menjadi baik, dengan skematik aliran debit puncak seperti pada gambar 3.

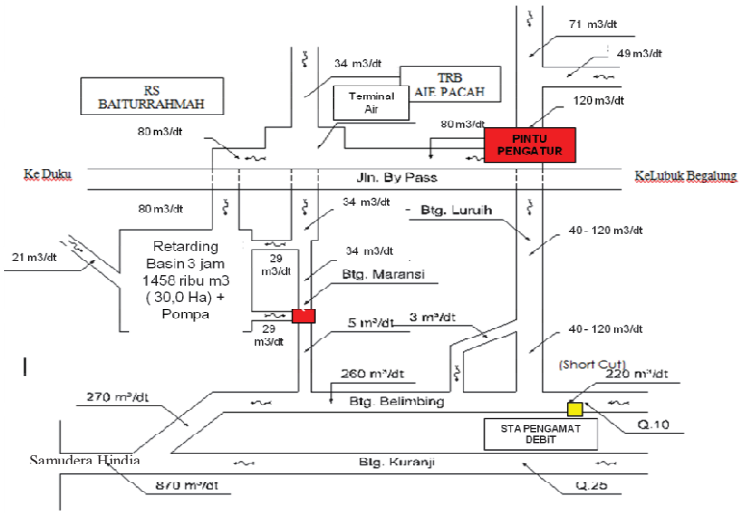

Gambar 3. Skematik Distribusi Banjir Bt. Luruih dan Bt. Maransi

Penetapan desain pengelolaan Batang Luruih dan Batang Maransi yang akan menggunakan tanah masyarakat disepanjang sungai dan pembebasan lahan 30 hektar (lokasi retensi banjir) dilakukan dengan pertemuan konsultasi dan peninjauan ke lokasi antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota Padang, antara lain Bappeda, Dinas PU Kota, Kantor Pertanahan, Dinas Tata Ruang dan Perijinan, Bagian Pemerintahan Kota.

4.4. Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi.

a. Pekerjaan konstruksi pengendalian banjir Batang Luruih dan Batang Maransi ini dilaksanakan sesuai Kontrak tahun jamak (harga satuan) antara Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat dengan Kontraktor PT. Waskita Karya tanggal 7 Desember 2012 nomor : 04.07/JMK-PBPP/APBDP-PSDA/XAA/2012 dengan waktu pelaksanaan 700 hari, mulai tanggal 7 Desember 2012 sampai dengan tanggal 6 November 2014, dengan kegiatan yang akan dilaksanakan peningkatan kapasitas sungai sepanjang 2.200 meter dan bangunan pelengkapnya.
b. Untuk pekerjaan konstruksi peningkatan sungai Batang Luruih dan Batang Maransi dari muaranya sampai dengan jalan Padang Bypass diperlukan pembebasan tanah dan tanaman masyarakat sepanjang 2.200 meter dan lebar 60 meter yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Padang [8].
   1) Sampai dengan September 2014 (kemajuan konstruksi 60 persen), lahan yang dapat dibebaskan hanya sepanjang 640 meter dari 2.200 meter yang rencana dibebaskan, disebabkan antara lain adanya kepemilikan lahan yang berpindah hak, sengketa lahan diantara pemilik tanah, ketidaksepakatan harga yang menyebabkan terkatung-katungnya proyek dan berakibat in efisiensi.
   2) Sehingga kontrak dilakukan perubahan dengan melaksanakan peningkatan sungai sepanjang tanah yang bebas dilengkapi dengan perkuatan tebing dari beton. Akibatnya pekerjaan konstruksi peningkatan Batang Luruih dan Batang Maransi tidak dapat

diselesaikan sesuai waktu kontrak dan memungkinkan kawasan Air Pacah tidak bebas banjir.

b. Oleh karenanya agar pekerjaan konstruksi pelebaran sungai sepanjang 1.660 (=2.200-640) meter dapat mencapai jalan Padang Bypass, Pemerintah Kota melalui tim pembebasan tanah [10] sebaiknya terus berusaha :
   1) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, swasta dan pemerintahan tentang rencana pengelolaan Batang Luruih dan Maransi melalui media cetak, elektronik dan papan pengumuman.
   2) Membuat rencana kerja pembebasan tanah dan tanaman bersama Dinas PSDA dan Pemerintahan Kota Padang sampai dengan akhir Desember 2014.
   3) Melakukan inventarisasi pemilik lahan (oleh Kantor Pertanahan Kota Padang) yang akan terkena tapak pelebaran sungai
   4) Melakukan pemanggilan kepada pemilik lahan yang terkena tapak pelebaran sungai melalui surat dan media dan/atau mendatangi pemilik lahan.
   5) Tim pembebasan tanah melaksanakan musyawarah dengan pemilik lahan untuk mencapai kesepakatan, dasar Nilai Jual Obyek Pajak dan batasan nilai apraisal independen.
   6) Melaksanakan pembayaran kepada pemilik lahan, bilamana pemilik tidak hadir maka sesuai peraturan perundang-undangan dana penggantian tanah dan tanaman dititipkan di Kantor Pengadilan Negeri Padang.

5. Kesimpulan dan Saran

Tertundanya manfaat pekerjaan pengendalian banjir Batang Maransi dan Batang Luruih karena keterlambatan pembebasan lahan. Masalah pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum antara lain disebabkan :

a. Kurang adanya pendekatan yang baik dari pelaksana dengan masyarakat berakibat dukungan terhadap pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak optimal.
b. Terhambatnya perolehan tanah dan pembangunan fisik yang disebabkan kepemilikan lahan yang berpindah hak, sengketa lahan diantara pemilik tanah, ketidaksepakatan harga, menyebabkan terkatung-katungnya proyek dan berakibat in efisiensi.
c. Keberhasilan pelaksanaan pengadaan tanah terutama ditentukan koordinasi yang baik para pelaksana, dukungan/ peran serta masyarakat, serta pelaksanaan musyawarah yang berkualitas dan efektif.
d. Terhadap permasalahan yang dihadapi diselesaikan dengan semangat kebersamaan untuk mencari solusi oleh para pelaksana berkoordinasi dengan Instansi berwenang.

Daftar Pustaka

[1] Study report on Padang Area Flood Control Project, December 1983 ;

[2] Completion Report for Padang Area Flood Control Project (II), Project Loan No. IP- 451 ;

[3] Master Plan Pusat Pemerintahan Kota Padang, Bappeda Kota Padang, 2010 ;

[4] Hasil Kajian Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Evakuasi dalam rangka Mitigasi Bencana Tsunami Kota Padang oleh Ditjen Penataan Ruang, Kementerian Pekerjaan Umum, 2008 ;

[5] Peraturan Daerah Kota Padang tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang 2010-2030 ;

[6] Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2011 tentang Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang dari wilayah Kecamatan Padang Barat ke wilayah Kecamatan Koto Tengah kota Padang.

[7] DED Batang Luruih dan Batang Maransi, 2011, Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat

[8] Normalisasi Batang Luruih dan Batang Latuang, Wakil Walikota Padang No. 611/4.79/DPU/2011 tanggal 14 Oktober 20

[9] Undang-undang No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

[10] Peraturan Presiden No. 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan pengadaan tanah dalam pembangunan untuk kepentingan umum, yang telah diganti dengan Peraturan Presiden No. 99 tahun 2014.